



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
(LKjIP)
TAHUN 2024

BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG
2025



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Sutan Syahrir No. 238 ☎(0752). 84506 Padang Panjang 27118.
Email : itkopadangpanjang@gmail.com – website: www.padangpanjang.co.id

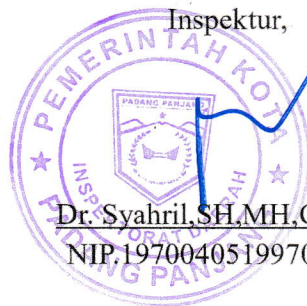
PERNYATAAN TELAH DIREVIU BAPPEDA TAHUN ANGGARAN 2024

Kami telah mereviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah pada BAPPEDA untuk tahun anggaran 2024 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen BAPPEDA.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Padang Panjang, 25 Februari 2025
Inspektur,



Dr. Syahril, SH, MH, CGCAE
NIP.197004051997031004

DAFTAR ISI

	Hal
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi	2
1.3. Susunan Organisasi	3
1.4. Struktur Organisasi	5
1.5. Permasalahan Utama (<i>Strategic Issuedd</i>) yang di hadapi Organisasi	6
1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah	11
 BAB II PERENCANAAN KINERJA	 13
2.1. Rencana Strategis	13
2.2. Perjanjian Kinerja	15
 BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	 17
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	17
3.1.1 Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan	19
3.1.2 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya	24
3.1.3 Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya	26
3.2. Realisasi Anggaran	27
 BAB VI PENUTUP	 31

KATA PENGANTAR

Good Governance merupakan syarat utama untuk dapat mewujudkan aspirasi masyarakat dalam mencapai tujuan dan cita-cita yang telah ditetapkan. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas dan nyata sehingga penyelenggaraan pemerintahan dapat dilakukan secara efektif dan efisien. Salah satu azas dalam penerapan tata pemerintahan yang baik adalah akuntabilitas. Akuntabilitas merupakan pertanggungjawaban amanah atau mandat yang melekat pada suatu Pemerintahan.

Laporan Kinerja Perangkat Daerah (LKjIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 disusun berdasarkan Perjanjian Kinerja Tahun 2024. LKjIP Tahun 2024 merupakan bentuk akuntabilitas publik dari pelaksanaan tugas dan fungsi dan penggunaan anggaran yang dipercayakan kepada setiap instansi pemerintah. Laporan ini sebagai media informasi publik atas capaian kinerja yang terukur. Capaian kinerja disajikan melalui pengukuran dan evaluasi kinerja serta pengungkapan (*disclosure*) secara memadai atas hasil analisis pengukuran kinerja.

Tujuan penyusunan laporan ini adalah untuk memberikan gambaran tingkat pencapaian instansi yang mengindikasikan tingkat keberhasilan dan kegagalan pencapaian sasaran strategis berdasarkan indikator-indikator yang ditetapkan. Diharapkan penyajian LKjIP ini dapat menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan kinerja agar lebih berorientasi pada hasil, relevan, efektif, efisien dan berkelanjutan di masa mendatang.

Padang Panjang, 8 Januari 2025

**KEPALA BADAN PERENCANAAN
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I/NIP. 19721016 199303 2 001

IKHTISAR EKSEKUTIF

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban atas Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yang memuat rencana, capaian, dan realisasi indikator kinerja dari sasaran strategis. Sasaran dan indikator kinerja termuat dalam Renstra Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026. Untuk mencapai sasaran tersebut, ditempuh dengan melaksanakan strategi, kebijakan, program dan kegiatan seperti telah dirumuskan dalam rencana strategis.

Ringkasan capaian kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang yang dihasilkan di tahun 2024 sebagai berikut :

- Tujuan

Tujuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yakni *“Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah”* dengan indikator tujuan *“Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota”* dengan target tahun 2024 sebesar 19,19 dan realisasi 22,93 (120,05)

- Sasaran

Sasaran Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, yakni :

- (a) *“Meningkatnya Kualitas Perencanaan”*, dengan indikator kinerja *“Indeks Kualitas Perencanaan”* dengan target tahun 2024 sebesar 70,00% dan realisasi sebesar 72,20% dengan capaian 103,14%
- (b) *“Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah”*, dengan indikator kinerja *“Indeks Inovasi Daerah”* dengan target tahun 2024 yakni Sangat Inovatif dan realisasi yakni Sangat Inovatif dengan capaian 100,00%

- Indikator kinerja :

- (a) *Indeks Kualitas Perencanaan*” terdiri atas penilaian Sub Dimensi : Forum SKPD (5%); Konsultasi Publik (10%); Musrenbang Kota (15%); Data Pendukung (15%); Konsistensi (20%); Inovasi (5%); Capaian Kinerja (15%); Pengendalian Rencana Kerja (10%); dan Penganggaran (5%)
- (b) Indikator Kinerja “*Indeks Inovasi Daerah*” berdasarkan hasil penilaian Innovative Government Award (IGA) dari Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia

Untuk mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan, BAPPEDA Kota Padang Panjang telah mengimplementasikan berbagai upaya strategis sebagai berikut:

1. Meningkatkan kualitas perencanaan melalui peningkatan kualitas sumber daya aparatur perencana Kota Padang Panjang, pelaksanaan diskusi kelompok dan kerjasama tim, optimalisasi koordinasi lintas sektor, serta monitoring dan evaluasi berkala
2. Meningkatkan kualitas riset dan inovasi daerah melalui pendampingan, monitoring dan evaluasi berkala.

Disamping itu ada beberapa kendala yang dihadapi, yakni :

1. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berpengaruh terhadap proses perencanaan di daerah;
2. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;
3. Pengaruh dan dampak globalisasi yang sering sulit diprediksi;

Untuk mengatasi kendala di atas, ada beberapa upaya yang dilakukan, yaitu :

1. Memperkuat peran forum data dalam rangka guna meningkatkan ketersediaan data yang mutakhir dan akurat.
2. Peningkatan kapasitas sumber daya manusia perencana melalui bimtek, diskusi kelompok dll agar dapat beradaptasi dengan cepat terhadap dinamika kebijakan lokal maupun global.

3. Meningkatkan pengelolaan riset dan inovasi daerah melalui pengembangan sistem monitoring dan evaluasi berbasis teknologi informasi (aplikasi Dianasari)
4. Meningkatkan fungsi monitoring dan evaluasi perencanaan pembangunan daerah melalui pengembangan aplikasi berbasis teknologi informasi (Serambi Plan)

Hasil evaluasi yang disampaikan dalam Laporan Kinerja Instansi Pemerintah ini penting dipergunakan sebagai pijakan bagi Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah dalam perbaikan kinerja di tahun yang akan datang.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Dalam upaya mewujudkan tata pemerintahan yang baik (*Good Governance*), setiap instansi pemerintah wajib menyusun Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP). Hal ini sesuai dengan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, dimana Peraturan Presiden ini mewajibkan setiap Kepala OPD untuk menyampaikan Laporan Akuntabilitas Kinerjanya kepada Walikota sebagai salah satu bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas pokok dan fungsi (tupoksi), penetapan kinerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang Tahun 2024 serta pertanggungjawaban dari penggunaan anggaran yang dikelolanya. Dengan berakhirnya pelaksanaan kegiatan tahun anggaran 2024, maka BAPPEDA Kota Padang Panjang berkewajiban melaporkan pelaksanaan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Pelaksanaan Anggaran Tahun 2024, sesuai dengan Perubahan Anggaran serta Pergeseran Tahun 2024.

LKjIP BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024 merupakan gambaran hasil yang dicapai berdasarkan kinerja masing-masing program, kegiatan dan sub kegiatan yang diukur dari pencapaian sasaran dan pencapaian kegiatan. Pengukuran pencapaian kinerja dilakukan dengan merujuk pada indikator kinerja input, output, dan outcome yang telah ditetapkan dan realisasi hasil pelaksanaan kegiatan tahun 2024.

Maksud penyusunan LKjIP BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024 adalah memberikan informasi yang akuntabel dan transparan mengenai pertanggungjawaban keberhasilan BAPPEDA Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya serta pencapaian dari penetapan kinerja pada tahun 2024, yang dilaksanakan melalui kebijakan, program, kegiatan dan sub kegiatan yang telah ditetapkan dalam APBD Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024.

Adapun tujuan penyusunan LKjIP ini adalah sebagai perwujudan akutabilitas BAPPEDA Kota Padang Panjang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya dalam rangka menciptakan pemerintahan yang baik.

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang dibentuk berdasarkan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah.

1.2. Kedudukan, Tugas Pokok dan Fungsi

Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang mempunyai dua kedudukan, yakni :

1. BAPPEDA merupakan unsur penunjang urusan pemerintahan bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.
2. BAPPEDA sebagaimana dimaksud dipimpin oleh Kepala yang berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Kepala BAPPEDA mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintah bidang perencanaan, penelitian dan pengembangan daerah yang menjadi kewenangan daerah.

Kepala BAPPEDA mempunyai fungsi sebagai berikut :

1. Perumusan kebijakan teknis urusan penunjang bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan;
2. Pengkoordinasian penyusunan kebijakan pembangunan jangka panjang, menengah, dan tahunan daerah;
3. Pengendalian, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas urusan penunjang bidang perencanaan dan bidang penelitian dan pengembangan;
4. Pengelolaan data dan informasi perencanaan pembangunan daerah;
5. Penyelenggaraan penelitian dan pengembangan untuk menyusun kebijakan teknis perencanaan pembangunan; dan
6. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Walikota sesuai tugas dan fungsinya.

1.3. Susunan Organisasi

Untuk melaksanakan tugas dan fungsi tersebut, Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang mempunyai susunan organisasi sebagai berikut :

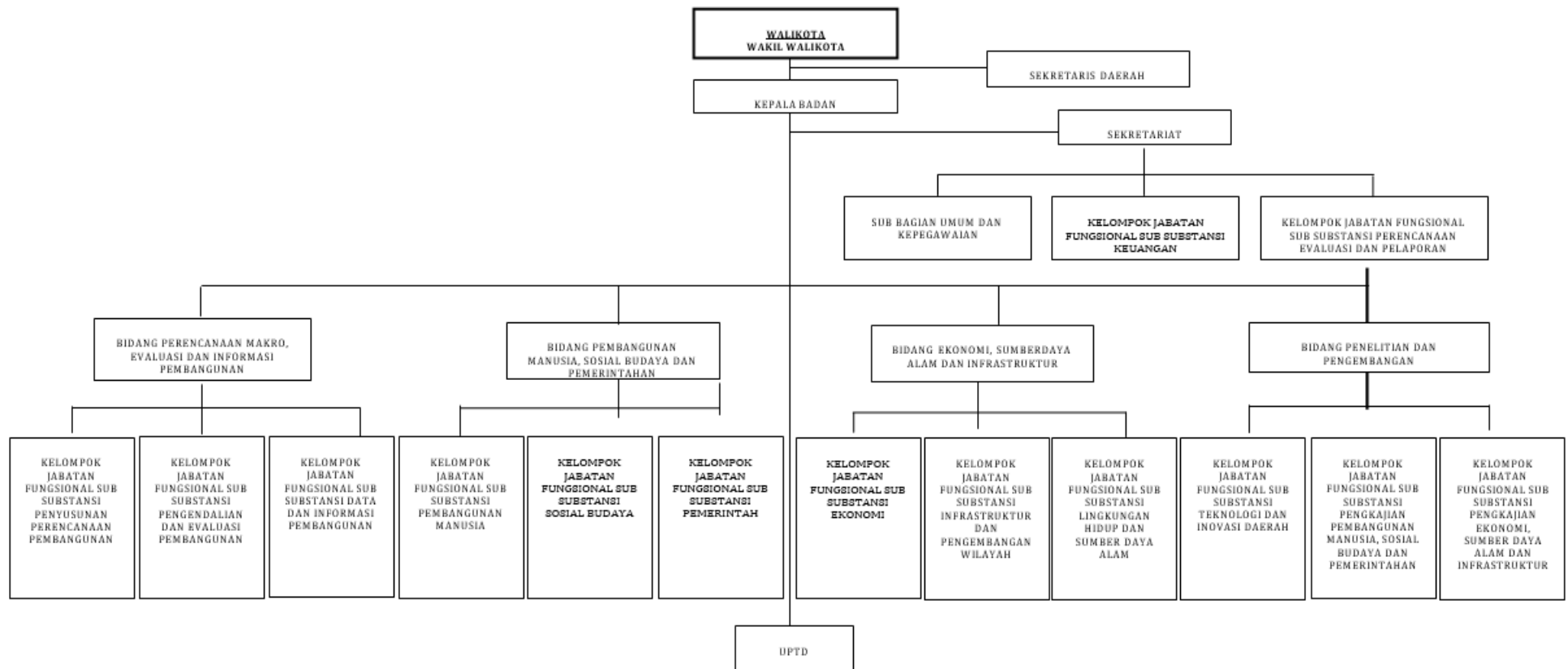
1. Kepala Badan;
2. Sekretariat, terdiri dari:
 - a. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Keuangan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan.
3. Bidang Perencanaan Makro, Evaluasi dan Informasi Pembangunan, terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Penyusunan Perencanaan Pembangunan;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Data dan Informasi Pembangunan.
4. Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan terdiri dari:
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pembangunan Manusia;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Sosial Budaya; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pemerintahan.
5. Bidang Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Ekonomi;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Infrastruktur dan Pengembangan Wilayah; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Lingkungan Hidup dan Sumberdaya Alam.
6. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - a. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Teknologi dan Inovasi Daerah;
 - b. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengkajian Pembangunan Manusia, Sosial, Budaya dan Pemerintahan; dan
 - c. Kelompok Jabatan Fungsional Sub Substansi Pengkajian Ekonomi, Sumberdaya Alam dan Infrastruktur.
7. UPT.

Dalam melaksanakan Tugas dan Fungsinya, BAPPEDA Kota Padang Panjang didukung oleh Pegawai Negeri Sipil (PNS), Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K), dan Tenaga Harian Lepas (THL) sebanyak 39 (tiga puluh sembilan) orang personil yang terdiri atas; 4 (empat) orang PNS Golongan IV, 25 (dua puluh lima) orang PNS Golongan III, 2 (dua) orang PNS Golongan II, 1 orang P3K, dan 7 (tujuh) orang THL.

1.4. Struktur Organisasi

Gambar 1.1

STRUKTUR ORGANISASI BAPPEDA KOTA PADANG PANJANG



1.5. Isu Strategis dan Aspek Strategis

Isu Strategis merupakan kondisi yang menjadi perhatian dalam perencanaan pembangunan karena dampaknya yang signifikan bagi OPD dimasa datang. Suatu kondisi atau kejadian yang menjadi isu strategis adalah keadaan yang apabila tidak diantisipasi, akan menimbulkan kerugian yang lebih besar atau sebaliknya, dalam hal tidak dimanfaatkan, akan menghilangkan peluang untuk meningkatkan layanan kepada masyarakat dalam jangka panjang. Sejalan dengan tugas pokok dan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah, beberapa isu strategis yang perlu menjadi pertimbangan adalah sebagai berikut :

1. Belum optimalnya ketersediaan data yang mutakhir dan akurat.
2. Kebijakan pusat yang sering berubah-ubah dalam perencanaan pembangunan daerah, sehingga berpengaruh terhadap proses perencanaan di daerah;
3. Koordinasi, integrasi, sinkronisasi dan sinergi antar berbagai kepentingan dan tingkatan belum optimal;
4. Belum optimalnya riset dan inovasi daerah;

Sebagai organisasi perangkat daerah, eksistensi BAPPEDA yang mempunyai tugas dan fungsi di bidang perencanaan pembangunan dan penelitian dan pengembangan daerah, memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya pencapaian tujuan pembangunan nasional. Dalam konteks perencanaan tersebut, BAPPEDA berperan antara lain :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Mendukung terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergi, baik antar daerah, maupun antara Pusat dan Daerah;
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;
4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Mendukung tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan, dan berkelanjutan.
6. Mendukung Pencapaian Indeks Inovasi Daerah

Bertitik tolak pada uraian di atas, tentunya dalam pelaksanaan tugas dan fungsi, BAPPEDA Kota Padang Panjang tidak luput dari Kekuatan (*Strengths*), Kelemahan (*Weaknesses*), Peluang (*Opportunities*), dan Ancaman (*Threats*). Namun permasalahan dan hambatan yang muncul akan menjadi tantangan serta isu strategis yang harus ditindaklanjuti dikemudian hari, terutama dalam perumusan strategi, kebijakan yang dilaksanakan melalui rencana tindak program dan kegiatan yang efektif dan berdayaguna. BAPPEDA dalam pelayanan perangkat daerah mengacu kepada peran dan tugasnya memiliki kekuatan (*Strengths*), yakni :

1. Pengambil kebijakan/keputusan teknis dibidang perencanaan yaitu penyusunan rencana pembangunan daerah, baik jangka panjang (RPJPD), jangka menengah (RPJMD) ataupun Rencana Pembangunan Daerah (RPD), maupun tahunan (RKPD). Dalam hal ini BAPPEDA juga bertugas antara lain di bidang penganggaran yaitu penyusunan alokasi pendanaan (indikatif) sebagai bahan penyusunan RAPBD, pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan.
2. *Think tank* atau pengkaji kebijakan di bidang perencanaan pembangunan dan kebijakan lainnya kerjasama dengan perguruan tinggi dan organisasi profesi.
3. Koordinator dengan maksud dalam hal koordinasi dan perumusan kebijakan di bidang perencanaan pembangunan, koordinasi, fasilitasi dan pelaksanaan perencanaan pencarian sumber-sumber pembiayaan dari provinsi dan pusat, koordinasi kegiatan strategi penanganan permasalahan mendesak.
4. Administrator dalam artian sebagai pengelola dokumen perencanaan, penyusunan dan pengelolaan laporan hasil pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan rencana pembangunan serta pembinaan dan pelayanan administrasi umum.

BAPPEDA Kota Padang Panjang dalam pelayanan perangkat daerah mengacu kepada peran dan tugasnya memiliki kelemahan (*Weaknesses*), diantaranya :

1. Kendala teknis, meliputi :
 - a. Kualitas sumber daya manusia di Bappeda dan lembaga terkait belum memadai
 - b. Kurangnya pengalaman di bidang perencanaan pembangunan daerah
2. Ketidaksesuaian dokumen perencanaan
 - a. Dokumen perencanaan daerah belum selaras 100% dengan realita pembangunan
 - b. Masih ada kegiatan inisiatif dari OPD setelah penetapan dokumen perencanaan
 - c. Deviasi antara terget dan realisasi pembangunan

BAPPEDA Kota Padang Panjang dalam pelayanan perangkat daerah mengacu kepada peran dan tugasnya memiliki peluang (*Oppoportunities*) yang dapat dimanfaatkan adalah sebagai berikut :

1. Adanya aturan perundang-undangan yang mengatur secara tahapan, tata cara teknis penyusunan perencanaan pembangunan daerah.
2. Tingginya komitmen perangkat daerah untuk melaksanakan proses perencanaan dengan dukungan database perencanaan yang baik dari masing-masing perangkat daerah mitra kerja dengan menggunakan sistem informasi berbasis teknologi informasi yang semakin berkembang;
3. Adanya regulasi yang mengatur Penguatan Inovasi Daerah.
4. Meningkatnya peran serta masyarakat dalam proses perencanaan pembangunan sehingga dapat mendorong berkembangnya usulan dan aspirasi masyarakat dalam bentuk kegiatan yang memang benar dibutuhkan dalam pembangunan daerah.

5. Meningkatnya kualitas perencanaan pembangunan melalui perumusan strategi dan arah kebijakan, prioritas dan fokus prioritas, kegiatan yang terukur dan jelas.

Berdasarkan kinerja pelayanan BAPPEDA Kota Padang Panjang yang telah dilaksanakan Tahun 2019-2023, melihat situasi yang ada dan perkembangan kondisi kedepannya, maka tantangan atau ancaman (*Treats*), yang perlu ditindaklanjuti dalam pelaksanaan pelayanan pada BAPPEDA adalah sebagai berikut :

1. Proses Perencanaan Pembangunan

Sebagaimana diatur dalam Undang-undang 25 tahun 2004 bahwa perencanaan pembangunan dilaksanakan melalui pendekatan teknokratis, partisipatif, politis, top down dan bottom up. Dalam pelaksanaannya, pendekatan ini belumlah terlaksana secara optimal. Hal ini dapat terlihat dari : (1) belum terciptanya rasa memiliki terhadap dokumen perencanaan pembangunan daerah, (2) kurangnya keterwakilan seluruh segmen masyarakat, termasuk masyarakat rentan dan pengarusutamaan gender, (3) belum optimalnya penetapan tolak ukur dan target kinerja dengan mempertimbangkan SPM pada program/kegiatan pembangunan daerah.

2. Penyusunan dokumen perencanaan pembangunan daerah

Perencanaan pembangunan daerah dituangkan dalam sebuah dokumen perencanaan, baik dokumen perencanaan pembangunan jangka panjang yang dituangkan dalam dokumen RPJPD, perencanaan pembangunan jangka menengah yang dituangkan dalam RPJMD, serta perencanaan pembangunan tahunan yang dituangkan dalam RKPD. Disamping itu dokumen perencanaan daerah tingkat kota tersebut dijabarkan oleh Organisasi Perangkat Daerah (OPD) kedalam dokumen perencanaan OPD, yaitu Renstra OPD untuk perencanaan jangka menengah dan Renja OPD untuk perencanaan tahunan. Dalam penyusunan perencanaan pembangunan daerah ini, masih kurang

optimalnya sinkronisasi antara dokumen perencanaan tingkat kota dengan dokumen perencanaan OPD. Disamping itu, juga terjadi inconsistency planning antara perencanaan jangka menengah dengan perencanaan tahunan.

3. Koordinasi dan Integrasi perencanaan dan penganggaran

Belum optimalnya integrasi, konsistensi dan keterikatan perencanaan dan penganggaran terhadap perumusan rencana program dan kegiatan prioritas pembangunan, sehingga dapat menjamin tercapainya tujuan dan sasaran program dan kegiatan pembangunan daerah. Disamping itu pelaksanaan fungsi Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah sebagai koordinator perencanaan pembangunan daerah juga belum terlaksana dengan optimal. Selain itu juga masalah yang juga muncul adalah berbagai kebijakan nasional yang berdampak pada perubahan kebijakan daerah secara mendadak sehingga menyebabkan inkonsistensi perencanaan pembangunan di daerah. Kemudian termasuk juga terdapatnya pertentangan/ketidaksesuaian antara peraturan perundangan yang mengatur sistem perencanaan pembangunan dengan peraturan perundangan lainnya yang berkaitan sehingga berdampak terhadap mekanisme perencanaan pembangunan daerah.

4. Pemanfaatan Kajian/Hasil Penelitian dalam perencanaan pembangunan

Secara umum, perencanaan pembangunan daerah yang berkualitas merupakan perencanaan yang dilakukan dengan melakukan analisis terhadap permasalahan, potensi serta sumberdaya yang ada di daerah. Perencanaan pembangunan terdiri dari perencanaan sektoral, yang masing-masing sektornya saling mendukung dan saling terintegrasi dan bersinergi satu dengan yang lainnya. Dalam penyusunan perencanaan sektoral ini, diperlukan kajian/penelitian serta perencanaan induk yang akan dijadikan sebagai pedoman dan acuan dalam pelaksanaan

kebijakan dan program pembangunan tahunan, sehingga rencana pembangunan sektoral ini akan lebih jelas dan terarah.

5. Meningkatnya kebutuhan data dalam penyusunan perencanaan

Rencana pembangunan yang berkualitas merupakan rencana pembangunan yang disusun dengan proses perencanaan yang sesuai dengan aspirasi dan kebutuhan masyarakat, serta dengan mempertimbangkan dan memanfaatkan segala potensi dan sumberdaya, serta analisis permasalahan yang muncul ditengah-tengah masyarakat. Analisis perencanaan dilakukan berdasarkan data yang akurat dan up to date serta realita yang terjadi di daerah, sehingga perencanaan dan kebijakan yang diambil betul-betul dapat menjawab dan memenuhi permasalahan masyarakat dan pembangunan yang dilaksanakan merupakan pembangunan yang berdaya guna dan berhasil guna.

6. Penguatan Inovasi Daerah

Penyelenggaraan inovasi daerah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2017 tentang Inovasi Daerah. Peraturan tersebut menetapkan tujuan inovasi daerah adalah untuk meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah. Kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah diartikan sebagai hasil kerja dari suatu keluaran yang dapat diukur dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah. Artinya, pemerintah daerah didorong untuk meningkatkan nilai tambah dan kualitas dalam penyelenggaraan urusan pemerintahannya melalui inovasi daerah. Kinerja pembangunan yang berkualitas ditandai dengan membaiknya indikator perekonomian daerah dan meningkatnya kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, inovasi daerah merupakan variabel yang semestinya inheren dan menjadi budaya kerja aparatur dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan melalui peningkatan pelayanan publik, pemberdayaan dan peran serta masyarakat, dan peningkatan daya saing daerah.

1.6. Sistematika Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Perangkat Daerah disusun berdasarkan sistematika yang ditetapkan Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 50 Tahun 2020 tentang Pedoman Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Daerah sebagai berikut:

Bab I PENDAHULUAN

Memuat gambaran umum mengenai BAPPEDA Kota Padang Panjang dan memuat permasalahan utama yang dihadapi organisasi

Bab II PERENCANAAN KINERJA

Dalam bab ini diuraikan ringkasan/ikhtisar Rencana Strategis dan Perjanjian Kinerja Tahun 2024 BAPPEDA Kota Padang Panjang

Bab III AKUNTABILITAS KINERJA

- a. Dalam sub bab ini diuraikan capaian kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.
- b. Realisasi Anggaran, Pada sub bab ini menguraikan anggaran yang tersedia dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang sesuai dengan dokumen Perjanjian Kinerja.

Bab IV PENUTUP

Dalam sub bab ini diuraikan capaian kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis sesuai dengan hasil pengukuran kinerja.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Perencanaan kinerja merupakan proses penyusunan rencana kinerja sebagai penjabaran dari sasaran dan program yang telah ditetapkan dalam rencana strategis, yang dilaksanakan melalui berbagai kegiatan tahunan. Dalam rencana kinerja ditetapkan rencana capaian kinerja tahunan untuk seluruh indikator kinerja yang ada pada tingkat sasaran sampai kegiatan. Penyusunan rencana kinerja dilakukan seiring dengan agenda penyusunan dan kebijakan anggaran, serta merupakan komitmen bagi Bappeda Kota Padang Panjang untuk mencapainya dalam tahun tertentu.

2.1. Rencana Strategis

Rencana Strategis (Renstra) Bappeda Kota Padang Panjang 2024-2026 merupakan dokumen perencanaan jangka menengah (3 tahun) dalam upaya mendukung pencapaian tujuan dan sasaran daerah oleh Penjabat Kepala Daerah, maka dirumuskan tujuan dan sasaran perangkat daerah dalam kurun waktu tiga tahun ke depan. Tujuan dan sasaran merupakan salah satu komponen dari perencanaan strategis, yang menunjukkan hal-hal yang akan dilakukan untuk mencapai tujuan dan sasaran Penjabat Kepala Daerah selama kurun waktu tiga tahun ke depan.

Tujuan BAPPEDA Kota Padang Panjang periode 2024-2026 adalah sebagai berikut : "Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah". Berdasarkan tujuan yang telah ditetapkan tersebut, maka sasaran yang akan dicapai selama tahun 2024-2026 adalah sebagai berikut : (1) Meningkatkan Kualitas Perencanaan, (2) Meningkatkan Kualitas Riset dan Inovasi Daerah. Untuk lebih jelasnya tujuan, sasaran serta indikator kinerja masing-masing sasaran dan target kinerja tahunan dapat dijelaskan melalui Tabel berikut, berdasarkan Rencana Strategis BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026.

Tabel 2.1.
Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan OPD
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah
Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Tujuan / Sasaran	Definisi Operasional	Kondisi Eksisting (2022)	Target Target Kinerja Sasaran pada Tahun ke			Ket.
						2024	2025	2026	
1.	Meningkatkan kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah		Nilai komponen perencanaan kinerja dalam SAKIP Kota	Nilai SAKIP Kota x 30% Bobot penilaian SAKIP tda : - Perencanaan Kinerja (30%) - Pengukuran Kinerja (30%) - Pelaporan Kinerja (15%) - Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal (25%)	18,59	19,19	19,46	19,72	
		1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Sub Dimensi Penilaian - Forum SKPD (5%) - Konsultasi Publik (10%) - Musrenbang Kota (15%) - Data Pendukung (15%) - Konsistensi (20%) - Inovasi (5%) - Capaian Kinerja (15%) - Pengendalian Rencana Kerja (10%) - Penganggaran (5%)	NA	70,00	70,50	71,00	
		2. Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Hasil penilaian IGA oleh Kemendagri	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	

Sumber Data : Renstra BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

Dari tabel tujuan dan sasaran Bappeda Kota Padang Panjang tahun 2024-2026 untuk sasaran pertama *“Meningkatnya Kualitas Perencanaan”* dengan IK : Indeks Kualitas Perencanaan, dan target 70,00; 70,50; 71,00. Penilaiannya berdasarkan sub dimensi: Forum SKPD (5%); Konsultasi Publik (10%); Musrenbang Kota (15%); Data Pendukung (15%); Konsistensi (20%); Inovasi (5%); Capaian Kinerja (15%); Pengendalian Rencana Kerja (10%); dan Penganggaran (5%).

Sedangkan untuk sasaran kedua *“Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah”* dengan IK : Indeks Inovasi Daerah, dan terget Sangat Inovatif; Sangat Inovatif; dan Sangat Inovatif. Penilaiannya berdasarkan Hasil penilaian Innovative Government Award (IGA) dari Kemendagri setiap penghujung tahun anggaran.

Renstra Bappeda Kota Padang Panjang 2024-2026 untuk tahun 2024 tidak ada mengalami perubahan dokumen Renstra, hal ini karena Renstra masih sesuai dengan kondisi saat ini, masih memenuhi kebutuhan organisasi, masih memberikan landasan yang kokoh untuk pengambilan keputusan, dan masih membantu organisasi berpikir secara strategis.

2.2. Perjanjian Kinerja

Pada tahun 2024 Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang telah melaksanakan seluruh program dan kegiatan yang menjadi tanggungjawabnya sesuai dengan Perjanjian Kinerja tahun 2024 dan Indikator Kinerja Utama Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang tahun 2024-2026.

Perjanjian Kinerja untuk tahun 2024 dan Perjanjian Kinerja Perubahan tahun 2024 mengalami perubahan pada Esselon II yakni Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang, dimana sebelumnya awal tahun 2024 masih Rusdianto, S.IP, MM. yang purnatugas pada 1 Mei 2024. Kemudian dilantik Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang yang baru pada akhir November 2024 yakni Argus Saadah, S.Sos, M.Si.

Tabel 2.2.
PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	70%	70%
2	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	577.190.250	435.469.952	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	130.000.000	89.432.700	
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	119.999.650	111.575.900	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5.612.607.014	5.529.620.141	

Sumber Data : Dokumen SAKIP, Perjanjian Kinerja Kepala BAPPEDA Tahun 2024

Untuk Perjanjian Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang Tahun 2024, pada Perjanjian Kinerja Perubahan tidak ada perubahan target kinerja. Namun untuk Anggaran mengalami perubahan karena di sesuaikan dengan DPA Perubahan BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024, dimana sebelumnya berdasarkan DPA BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024.

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1. Capaian Kinerja Organisasi

Sesuai dengan Tupoksi BAPPEDA Kota Padang Panjang seperti yang dijelaskan pada Bab sebelumnya dan sesuai dengan penetapan perjanjian kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024, maka dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan seluruh program kegiatan pada BAPPEDA Kota Padang Panjang dicapai dengan 2 sasaran yakni :

- 1. Meningkatnya Kualitas Perencanaan**
- 2. Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah**

Tabel 3.1
Pengukuran Capaian Kinerja
BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2023

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	% Capaian
1	2	3	4	5	6
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	70,00	72,20	103,14%
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100,00%

Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2024

Untuk mengetahui dan menghitung sasaran pertama “Meningkatnya Kualitas Perencanaan”. BAPPEDA Kota Padang Panjang memiliki definisi operasional yang mencakup sub dimensi penilaian yakni : Forum SKPD (5%), Konsultasi Publik (10%), Musrenbang Kota (15%), Data Pendukung (15%), Konsistensi (20%), Inovasi (5%), Capaian Kinerja (15%), Pengendalian Rencana Kerja (10%) dan Penganggaran (5%). Dan Indeks Inovasi Daerah, dimana hasil penilaian IGA (Inovative Goverment Award) dinilai oleh Kementerian Dalam Negeri pada Desember 2024.

Tabel 3.2

Perhitungan Indeks Kualitas Perencanaan Tahun 2024

Dimensi Penilaian	Bobot	Sub Dimensi Penilaian	Bobot	Item Penilaian	Bobot	Penilaian
1	2	3	4	5	6	7
Proses	30%	Forum OPD	5%	Persentase OPD yang melakukan Forum OPD	3%	0
				Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD	2%	0
		Konsultasi Publik	10%	Tingkat kehadiran pemangku kepentingan dalam Konsultasi Publik	3%	2,1%
				Tingkat partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam Konsultasi Publik	3%	2,5%
				Ketepatan waktu pelaksanaan Konsultasi Publik	2%	2%
				Survey kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik	2%	0
		Musrenbang Kota	15%	Tingkat kehadiran pemangku kepentingan dalam Musrenbang Kota	5%	2,1%
				Tingkat partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam Musrenbang Kota	4%	2,5%
				Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Kota	3%	2%
				Survey kepuasan pelaksanaan Musrenbang Kota	3%	0
Isi	40%	Data Pendukung	15%	Persentase ketersediaan data IKU	8%	8%
				Persentase ketersediaan data IKD	7%	7%
		Konsistensi	20%	Keselaran Program RKPD dan RPD	10%	10%
				Konsistensi anggaran per Program RKPD dan RPD	10%	6%
		Inovasi	5%	Ketersediaan Inovasi dalam Dokumen Perencanaan	5%	5%
Tindak Lanjut	30%	Capaian Kinerja	15%	Persentase Capaian IKU	8%	7%
				Persentase Capaian IKD	7%	6%
		Pengendalian Rencana Kerja	10%	Persentase rekomendasi hasil evaluasi yang ditindaklanjuti oleh OPD	10%	5%
		Penganggaran	5%	"Persentase prioritas pembangunan pada RPD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD Hasil : ≥ 50% = 100% ≤ 50% = 25%	5%	5%

Sumber Data : BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun 2024

3.1.1. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan maupun kegagalan dapat dilihat berdasarkan sasaran dan masing-masing indikatornya. Sasaran pertama *"Meningkatnya Kualitas Perencanaan"* dengan indikator kinerja *"Indeks Kualitas Perencanaan"*. Sub Dimensi Penilaian yakni :

1. Dimensi Proses Perencanaan

Dimensi Proses Perencanaan dengan bobot sebesar 30% adalah tahapan proses penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Bappeda Kota Padang Panjang sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, dalam hal ini adalah proses penyusunan RKPD Tahun 2025. Dimensi Proses Perencanaan dipengaruhi oleh 3 sub dimensi yaitu Forum Perangkat Daerah, Konsultasi Publik, dan Musrenbang Kota. Tahun 2024, Dimensi Proses Perencanaan hanya tercapai sebesar 13,2%. Adapun hasil yang diperoleh dari masing-masing sub dimensi adalah sebagai berikut :

a. Forum OPD

Forum OPD memiliki bobot 5%. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017, Forum OPD merupakan wadah penampungan dan penjangkaran aspirasi masyarakat dan dunia usaha (pemangku kepentingan) untuk penyempurnaan rancangan kebijakan penyusunan Renja Perangkat Daerah yang dilakukan oleh masing-masing Perangkat Daerah. Namun Tahun 2024 Bappeda tidak melaksanakan Forum OPD (0%). Penilaian untuk sub dimensi Forum OPD ini dilakukan melalui 2 item penilaian yaitu:

1) Persentase OPD yang melakukan Forum OPD

Persentase OPD yang melakukan Forum OPD dengan bobot 3%, karena tidak terlaksana jadi bobot hanya 0%

2) Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD

Ketepatan waktu pelaksanaan Forum OPD dengan bobot 2%, karena tidak terlaksana jadi bobot hanya 0%

b. Konsultasi Publik

Konsultasi Publik memiliki bobot 10%. Bappeda Kota Padang Panjang telah melaksanakan Konsultasi Publik Penyusunan RKPD Tahun 2024. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 80 menyebutkan bahwa Forum Konsultasi Publik dilaksanakan bertujuan untuk memperoleh saran dan masukan untuk penyempurnaan Rancangan Awal RKPD yang dirumuskan dalam Berita Acara Kesepakatan yang ditandatangani oleh setiap unsur yang mewakili pemangku kepentingan. Namun Tahun 2024 Bappeda hanya mencapai bobot 6,6%. Penilaian untuk sub dimensi Konsultasi Publik dilakukan melalui 4 item penilaian, yaitu :

- 1) Tingkat kehadiran pemangku kepentingan dalam Konsultasi Publik
Tingkat kehadiran pemangku kepentingan dalam Konsultasi Publik memiliki bobot 3%. Untuk tahun 2024 hanya mencapai bobot 2,1%
- 2) Tingkat partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam Konsultasi Publik
Tingkat partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam Konsultasi Publik memiliki bobot 3%. Untuk tahun 2024 hanya mencapai bobot 2,5%
- 3) Ketepatan waktu pelaksanaan Konsultasi Publik
Ketepatan waktu pelaksanaan Konsultasi Publik memiliki bobot 2%, Untuk tahun 2024 dapat mencapai bobot 2%
- 4) Survey kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik
Survey kepuasan pelaksanaan Konsultasi Publik memiliki bobot 2%, namun untuk tahun 2024 Bappeda tidak melaksanakan (0%)

c. Musrenbang Kota

Musrenbang Kota memiliki bobot 15%. Bappeda Kota Padang Panjang tahun 2024 melaksanakan Musrenbang Kota sebanyak 2 kali, yakni Musrenbang RPJPD 5 Maret 2024 dan Musrenbang RKPD pada tanggal 6 Maret 2024. Sesuai dengan Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 91 menyebutkan bahwa Pelaksanaan Musrenbang RKPD Kabupaten/Kota dilaksanakan dalam rangka pembahasan rancangan

RKPD Kota guna menyepakati prioritas pembangunan daerah, arah kebijakan pembangunan, menyepakati program, kegiatan, indikator dan target kinerja. Namun Tahun 2024 Bappeda hanya mencapai bobot 6,6%. Penilaian untuk sub dimensi Musrenbang Kota dilakukan melalui 4 item penilaian, yaitu :

- 1) Tingkat kehadiran pemangku kepentingan dalam Musrenbang Kota
Tingkat kehadiran pemangku kepentingan dalam Musrenbang Kota memiliki bobot 5%, namun tahun 2024 hanya mencapai bobot 2,1%.
- 2) Tingkat partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam Musrenbang Kota
Tingkat partisipasi aktif pemangku kepentingan dalam Musrenbang Kota memiliki bobot 4%, namun tahun 2024 hanya mencapai bobot 2,5%.
- 3) Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Kota
Ketepatan waktu pelaksanaan Musrenbang Kota memiliki bobot 3%, namun tahun 2024 hanya mencapai bobot 2%
- 4) Survey kepuasan pelaksanaan Musrenbang Kota
Survey kepuasan pelaksanaan Musrenbang Kota memiliki bobot 3%, namun untuk tahun 2024 Bappeda tidak melaksanakan (0%)

2. Dimensi Isi Perencanaan

Dimensi Isi dokumen Perencanaan memiliki bobot 40%. merupakan penilaian terhadap muatan dokumen perencanaan dalam hal ini adalah dokumen RKPD. Pada tahun 2024 Dimensi Isi tercapai sebesar 36%. Dimensi Isi dokumen Perencanaan dipengaruhi oleh 3 sub dimensi yaitu Data Pendukung, Konsistensi, dan Inovasi. Adapun hasil yang diperoleh dari masing-masing sub dimensi adalah sebagai berikut :

a. Data Pendukung

Data Pendukung memiliki bobot 15%. Tahun 2024 Bappeda dapat mencapai bobot 15%. Penilaian untuk sub dimensi Data Pendukung dilakukan melalui 2 item penilaian, yaitu :

- 1) Persentase ketersediaan data IKU

Ketersediaan data Indikator Kinerja Utama (IKU) memiliki bobot 8%, yang dimaksud disini adalah mempunyai perangkat daerah menyediakan data IKU berikut dengan penghitungannya. Data IKU yang ada didalam dokumen RKPD Tahun 2024 berjumlah 23 data dan bisa disediakan penghitungannya oleh perangkat daerah untuk keseluruhan data tersebut. Pada tahun 2024 tercapai sebesar 8%.

2) Persentase ketersediaan data IKD

Ketersediaan data Indikator Kinerja Daerah (IKD) memiliki bobot 7%, yang dimaksud disini adalah mempunyai perangkat daerah menyediakan data IKD berikut dengan penghitungannya. Data IKD yang ada didalam dokumen RKPD Tahun 2025 berjumlah 230 data dan bisa disediakan penghitungannya oleh perangkat daerah untuk keseluruhan data tersebut. Pada tahun 2024 tercapai sebesar 7%

b. Konsistensi

Konsistensi memiliki bobot 20%, tahun 2024 Bappeda hanya mencapai bobot 16%. Penilaian sub dimensi konsistensi dalam dokumen perencanaan RKPD Tahun 2024 diukur melalui 2 item penilaian, yaitu:

1) Keselarasan Program RKPD dan RPD

Keselarasn program antara RKPD dengan RPD memiliki bobot 10%, dilihat dari jumlah program yang sesuai dengan RPD dibandingkan dengan jumlah program pada RPD. Pada tahun 2024 mencapai bobot 10%.

2) Konsistensi anggaran per Program RKPD dan RPD

Keselarasn program antara RKPD dengan RPD memiliki bobot 10%. Sesuai dengan amanah Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 Pasal 102 ayat (4) e dimana anggaran pada RKPD itu harus konsisten dengan kerangka pendanaan dalam RPJMD. Pada tahun 2024 hanya mencapai bobot 6%.

c. Inovasi

Sub dimensi penilaian inovasi memiliki bobot 5%. Dilihat dari ketersediaan inovasi dalam dokumen perencanaan. Dalam hal ini, pada RKPD Tahun 2025 substansi inovasi yang akan direncanakan sudah dimuat. Pada tahun 2024 sub dimensi ini mencapai bobot 5%.

3. Dimensi Tindak Lanjut Perencanaan

Pada Dimensi Tindak Lanjut dengan bobot sebesar 30%, kualitas perencanaan dapat diukur apabila perencanaan yang sudah dibuat bisa diimplementasikan dan ditindaklanjuti oleh Perangkat Daerah. Ketercapaian Dimensi Tindak Lanjut dipengaruhi oleh 3 sub dimensi yaitu Capaian Kinerja, Pengendalian Rencana Kerja, dan Penganggaran. Pada tahun 2024, Dimensi Tindak Lanjut tercapai sebesar 23%. Adapun hasil yang diperoleh dari masing-masing sub dimensi adalah sebagai berikut :

a. Capaian Kinerja

Capaian Kinerja memiliki bobot 15%, Sub Dimensi Capaian Kinerja diukur melalui penilaian terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) dan capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) selama tahun anggaran 2024. Berikut capaian kinerja IKU dan IKD pada tahun 2024 yang hanya mencapai 13% :

1) Persentase Capaian IKU

Persentase Capaian IKU memiliki bobot 8%. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Kepala Daerah yang sudah tertuang dalam RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026, sampai dengan kondisi Desember 2024 dari 23 IKU Kepala Daerah hanya 20 IKU yang tercapai sesuai dengan target yang telah ditetapkan untuk kinerja tahun 2024. Jadi untuk tahun 2024 hanya mencapai 7%.

2) Persentase Capaian IKD

Persentase Capaian IKU memiliki bobot 7%. Berdasarkan hasil pembahasan terhadap capaian Indikator Kinerja Daerah (IKD) yang sudah tertuang dalam RPD Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026 sampai dengan kondisi Desember 2024 hanya mencapai bobot 6%.

b. Pengendalian Rencana Kerja

Pengendalian Rencana Kerja memiliki bobot 10%. Sub Dimensi Pengendalian Rencana Kerja diukur melalui Persentase Rekomendasi Hasil Evaluasi yang ditindaklanjuti oleh OPD selama pelaksanaan verifikasi dokumen Renja Tahun 2025 yang dilaksanakan pada tahun

2024 oleh 2 bidang perencanaan di Bappeda Kota Padang Panjang (Bidang Pembangunan Manusia, Sosial Budaya dan Pemerintahan, dan Bidang Ekonomi, Sumber Daya Alam dan Infrastruktur) dengan capaian 50%. Jadi untuk tahun 2024 hanya mencapai bobot 5%.

c. Penganggaran

Penganggaran memiliki bobot 5%. Sub Dimensi Penganggaran diukur melalui persentase prioritas pembangunan pada RPD menjadi anggaran prioritas dalam RKPD Tahun 2025. Jadi untuk tahun 2024 telah mencapai bobot 5%.

3.1.2. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Tahun Sebelumnya

Kinerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah (BAPPEDA) Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang untuk tahun 2024 berbeda dengan tahun sebelumnya, dimana tahun 2024 berdasarkan pada Renstra BAPPEDA tahun 2024-2026 dan tahun sebelumnya berdasarkan Renstra Perubahan BAPPEDA tahun 2018-2023.

Untuk tahun 2022 dan tahun 2023 BAPPEDA Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang memiliki 3 (Tiga) Sasaran Strategis sesuai Renstra Perubahan BAPPEDA tahun 2018-2023 yakni : (1) Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah (IK : Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah), (2) Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan (IK : Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan), (3) Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting (IK : Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting).

Berbeda dengan tahun sebelumnya untuk tahun 2024 BAPPEDA Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang memiliki 2 (Dua) Sasaran Strategis sesuai dengan Renstra BAPPEDA tahun 2024-2026 yakni : (1) Meningkatnya Kualitas Perencanaan (IK : Indeks Kualitas Perencanaan) dan (2) Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah (IK : Indeks Inovasi Daerah). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.3
Perbandingan Realisasi Kinerja serta Capaian Kinerja Tahun ini dan Dua Tahun lalu
Pada BAPPEDA Kota Padang Panjang

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2022			Tahun 2023			Tahun 2024			Ket.
			Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	Target	Realisasi	Capaian (%)	
Berdasarkan Renstra Perubahan Tahun 2018-2023												
1	Meningkatkan kualitas perencanaan pembangunan daerah	Persentase rata-rata ketercapaian sasaran daerah	72,00%	69,71%	95,49%	73,00%	68,75%	94,18%				
2	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	Persentase kon-sistensi perencanaan pelaksanaan program penanggulangan kemiskinan	95,00%	96,37%	101,44%	96,37%	100,00%	103,77%				
3	Meningkatkan konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	Persentase konsistensi perencanaan pelaksanaan program penurunan stunting	91,70%	100,00%	109,05%	100,00%	100,00%	100,00%				
Berdasarkan Renstra Tahun 2024-2026												
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan							70,00	72,20	103,14%	
2	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah							Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	100,00%	

Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2024

Realisasi Kinerja tahun ini pada BAPPEDA Kota Padang Panjang jika dibandingkan dengan target jangka menengah (Periode Akhir Renstra) sudah melebihi target, dimana sasaran strategis pertama, Meningkatnya Kualitas Perencanaan (IK : Indeks Kualitas Perencanaan) untuk tahun 2024, dengan target 70,00 dan realisasi 72,20. Sedangkan untuk tahun 2026 target 71,00.

Sasaran strategis kedua, Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah (IK : Indeks Inovasi Daerah) untuk tahun 2024, dengan target "Sangat Inovatif" dan realisasi "Sangat Inovatif". Sedangkan untuk tahun 2026 target "Sangat Inovatif". Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel dibawah ini :

Tabel 3.4
Perbandingan Realisasi Kinerja Tahun ini dengan Target Jangka Menengah
(Periode Akhir Renstra) pada BAPPEDA Kota Padang Panjang

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Tahun 2024		Target Akhir Renstra (2026)
			Target	Realisasi	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	70,00	72,20	71,00
2	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2024

3.1.3. Analisis Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Untuk mencapai tujuan Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang yaitu Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintah daerah, maka diperlukan Sumber Daya yang memadai, berupa (a) Sumber Daya Manusia yang kompeten, (b) Sumber Dana yang mencukupi, dan (c) Sarana dan Prasarana yang memadai.

Tabel 3.5
Analisis Efisiensi Sumber Daya
Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah

No	Kondisi Ideal	Kondisi Saat Ini	Kekurangan/Kelebihan	Tindak Lanjut
1.	Kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang optimal.	Ketidakseimbangan antara kualitas dan kuantitas SDM aparatur yang ada.	Kurang optimalnya dalam hal peningkatan kualitas SDM aparatur.	Evaluasi kinerja SDM serta mengadakan pelatihan/bimtek bagi SDM aparatur secara merata.
2.	Ketersediaan sumber dana yang cukup untuk pelaksanaan kegiatan	Sumber dana yang tersedia masih belum mencukupi kebutuhan pelaksanaan kegiatan	Kekurangan sumber dana mempengaruhi kinerja pelaksanaan kegiatan	Membuat perencanaan anggaran tambahan untuk mencapai target kebutuhan pelaksanaan kegiatan.
3.	Tercukupinya sarana prasarana kerja untuk mendukung operasional kegiatan	Sarana dan prasarana yang mendukung operasional kegiatan di Kecamatan dan Kelurahan, masih belum memadai.	Kekurangan jumlah perangkat elektronik komputer dan printer) dan fasilitas mobiler (meja kerja, lemari penyimpanan file, kursi kerja, dll)	Pengadaan peralatan dan perlengkapan kantor sesuai kebutuhan.

Sumber Data : BAPPEDA Tahun 2024

3.2. Realisasi Anggaran

Untuk melihat capaian realisasi keuangan maka ada beberapa sasaran strategis yang dapat di rangkum dan dijadikan sebagai ukuran, yaitu :

Tabel 3.6
Tabel Realisasi Anggaran
BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024

No	Nama Program dan Kegiatan	Pagu Anggaran		Realisasi	Persentase	Silpa
		PK	LRA			
1	2	3	3	4	5	6
I	PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	5.529.620.141	5.573.652.844	5.503.276027		
A.	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	4.401.541.319	4.507.364.022	4.492.158.652		
1.	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	4.401.541.319	4.507.364.022	4.492.158.652	99,66%	15.205.370
B.	Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	35.500.000	35.500.000	34.650.000		
2.	Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	35.000.000	35.500.000	34.650.000	97,61%	850.000
C.	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	517.358.737	517.358.737	501.340.412		
3.	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	4.967.000	4.967.000	4.403.300	88,65%	563.700
4.	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	55.138.537	55.138.537	49.619.600	98,99%	5.518.937
5.	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	15.198.200	15.198.200	11.694.400	76,95%	3.503.800
6.	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	442.055.000	442.055.000	435.623.112	98,55%	6.431.888
D.	Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	140.344.700	140.344.700	127.050.000		
7.	Pengadaan Mebel	140.344.700	140.344.700	127.050.000	90,53%	13.294.700
E.	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	189.181.385	174.941.385	167.703.027		
8.	Penyediaan Jasa Surat Menyurat	2.080.000	2.080.000	1.750.000	84,13%	330.000
9.	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	14.999.385	14.999.385	10.477.248	69,85%	4.522.137
10.	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	172.102.000	157.862.000	155.475.779	98,49%	2.386.221
F.	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	245.694.000	198.144.000	180.373.936		
11.	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	226.120.000	178.570.000	168.085.936	94,13%	10.484.064
12.	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	19.574.000	19.574.000	12.288.000	62,78%	7.286.000

1	2	3	3	4	5	6
II.	PROGRAM PERENCANAAN, PENGENDALIAN DAN EVALUASI PEMBANGUNAN DAERAH	435.469.952	419.184.752	395.448.701		
G.	Penyusunan Perencanaan dan Pendanaan	407.075.552	395.590.352	376.183.701		
13.	Pelaksanaan Musrenbang Kabupaten/Kota	88.370.000	88.370.000	84.854.550	96,02%	3.515.450
14.	Koordinasi Penyusunan dan Penetapan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten/Kota	318.705.552	307.220.352	291.329.151	94,83%	15.891.201
H.	Analisis Data dan Informasi Pemerintahan Daerah Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	4.266.400	4.266.400	3.175.000		
15.	Analisis Data dan Informasi Perencanaan Pembangunan Daerah	4.266.400	4.266.400	3.175.000	74,42%	1.091.400
I.	Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Bidang Perencanaan Pembangunan Daerah	12.893.000	12.893.000	9.887.650		
16.	Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah	12.893.000	12.893.000	9.887.650	76,69%	3.005.350
J.	Implementasi Sistem Informasi Pemerintah Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	11.235.000	6.435.000	6.202.350		
17.	Pengelolaan Data dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah di Bidang Pembangunan Daerah	11.235.000	6.435.000	6.202.350	96,38%	232.650
III.	PROGRAM KOORDINASI DAN SINKRONISASI PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH	89.432.700	82.814.700	77.961.250		
K.	Koordinasi Perencanaan Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia	52.939.700	46.321.700	43.571.040		
18.	Pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi Penyusunan Dokumen Perencanaan Pembangunan Perangkat Daerah Bidang Pembangunan Manusia	20.003.350	13.385.350	12.850.750	96,01%	534.600
19.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Pembangunan Manusia	32.936.350	32.936.350	30.720.290	93,27%	2.216.060
L.	Kegiatan Koordinasi Perencanaan Bidang Perekonomian dan SDA (Sumber Daya Alam)	11.086.600	11.086.600	9.438.450		
20.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang SDA	11.086.600	11.086.600	9.438.450	85,13%	1.648.150

1	2	3	3	4	5	6
M.	Koordinasi Perencanaan Bidang Infrastruktur dan Kewilayahan	25.406.400	25.406.400	24.951.760		
21.	Koordinasi Pelaksanaan Sinergitas dan Harmonisasi Perencanaan Pembangunan Daerah Bidang Kewilayahan	25.406.400	25.406.400	24.951.760	98,21%	454.640
IV.	PROGRAM PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH	111.575.900	84.367900	80.193.035		
N.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Sosial Budaya dan Kependudukan	20.000.000	12.566.000	11.857.250		
22.	Penelitian dan Pengembangan Pendidikan dan Kebudayaan	20.000.000	12.566.000	11.857.250	94,36%	708.750
O.	Penelitian dan Pengembangan Bidang Ekonomi dan Pembangunan	20.000.000	14.594.000	13.891.025		
23.	Penelitian dan Pengembangan Perindustrian dan Perdagangan	20.000.000	14.594.000	13.891.025	95,18%	702.975
P.	Pengembangan Inovasi dan Teknologi	71.575.900	57.207.900	54.444.760		
24.	Penelitian, Pengembangan, dan Perekayasaan di Bidang Teknologi dan Inovasi	71.575.900	57.207.900	54.444.760	95,17%	2.763.140
	JUMLAH	6.160.020.196	6.160.020.196	6.056.879.013	98,33%	103.141.183

Berdasarkan Tabel di atas dapat dijelaskan bahwa secara keseluruhan rata-rata capaian realisasi keuangan pelaksanaan program dan kegiatan untuk mendukung kinerja BAPPEDA Kota Padang Panjang Tahun Anggaran 2024 dengan jumlah anggaran sebesar Rp.6.160.020.196,- dengan realisasi keuangan sebesar Rp.6.056.879.013,- (98,33%) dengan silpa Rp.103.141.183,-.

BAB IV

PENUTUP

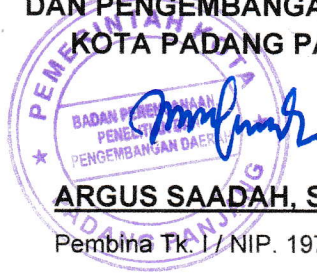
Secara kuantitatif, kegiatan pada Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Kota Padang Panjang tahun 2024 telah dilaksanakan dengan baik, dengan target fisik 100% dan realisasi fisik mencapai 100%. Sedangkan capaian kinerja keuangan mencapai 98,33%. Dari sisi keuangan kami juga merencanakan efisiensi dari pelaksanaan kegiatan pada Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024.

Sedangkan untuk sasaran yang dicapai dapat dilihat sebagai berikut : Pertama *"Meningkatnya Kualitas Perencanaan"* dengan IK : *Indeks Kualitas Perencanaan*, target 70,00, realisasi 72,20, dengan capaian 103,14%. Kedua *"Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah"* dengan IK : *Indeks Inovasi Daerah*, target *Sangat Inovatif*, realisasi *Sangat Inovatif*, dengan capaian 100%.

Namun demikian masih terdapat beberapa kendala yang dihadapi dalam proses perencanaan pembangunan daerah secara umum seperti belum optimalnya ketersediaan data yang mutakhir dan akurat, belum optimalnya koordinasi antar stakeholder, belum optimalnya riset dan inovasi daerah serta tingginya dinamika kebijakan di tingkat Nasional berpengaruh terhadap pencapaian sasaran perencanaan pembangunan.

Dalam rangka menerapkan prinsip *Good Governance*, khususnya prinsip transparansi dan akuntabilitas dalam penyelenggaraan kegiatan pembangunan, masih sangat diperlukan komitmen bersama dari seluruh *stakeholders*, khususnya konsistensi dalam pelaksanaan perencanaan sebagaimana telah direncanakan dan disusun serta dituangkan dalam dokumen perencanaan, sehingga capaian kinerja kegiatan dapat diukur keberhasilannya.

Padang Panjang, 8 Januari 2025
**KEPALA BADAN PERENCANAAN PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si

Pembina Tk. I / NIP. 19721016 199303 2 001

Lampiran :

Perjanjian Kinerja Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114

Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623

Email: bappeda@padangpanjang.go.id – Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : RUSDIANTO, S.IP, MM.

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA

Jabatan : PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 2 Januari 2024

PIHAK KEDUA
PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG



SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG



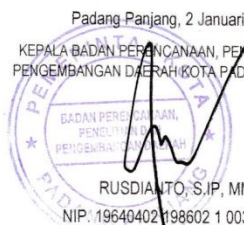
RUSDIANTO, S.IP, MM
NIP. 19640402 198602 1 003

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target
(1)	(2)	(3)	(4)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	70%
2	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif

No	Program	Anggaran	Keterangan
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	577,190,250	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	130,000,000	
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	119,999,650	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,612,607,014	


 P.J. WALIKOTA PADANG PANJANG
 SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 2 Januari 2024
 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

 RUSDIAITO, S.I.P, MM
 NIP. 19640402 198602 1 003

Perjanjian Kinerja Perubahan Tahun 2024



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No. 4 Padang Panjang Kode Pos 27114

Telp. (0752) 83147-83148 Fax 484623

Email: bappeda@padangpanjang.go.id – Website: www.bappeda.padangpanjang.go.id

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si

Jabatan : KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG

Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : SONNY BUDAYA PUTRA

Jabatan : PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai lampiran perjanjian ini dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggung jawab kami.

PIHAK KEDUA akan memberikan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Padang Panjang, 28 November 2024

PIHAK KEDUA
PJ. WALIKOTA PADANG PANJANG


SONNY BUDAYA PUTRA

PIHAK PERTAMA
KEPALA BADAN PERENCANAAN,
PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN
DAERAH KOTA PADANG PANJANG


ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001

PERJANJIAN KINERJA PERUBAHAN TAHUN 2024
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	
			Sebelum	Sesudah
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	70%	70%
2	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif	Sangat Inovatif

No	Program	Anggaran		Keterangan
		Sebelum	Sesudah	
1	Program Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah	577,190,250	435,469,952	
2	Program Koordinasi dan Sinkronisasi Perencanaan Pembangunan Daerah	130,000,000	89,432,700	
3	Program Penelitian dan Pengembangan Daerah	119,999,650	111,575,900	
4	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	5,612,607,014	5,529,620,141	


 W. WALIKOTA PADANG PANJANG
 SONNY BUDAYA PUTRA

Padang Panjang, 28 November 2024
 KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
 PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

 ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
 NIP. 19721016 199303 2 001

Indikator Kinerja Utama (IKU)



**PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114
Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.padangpanjang.go.id

**KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG
NOMOR : 050/1/BAPPEDA-PP/2024**

TENTANG

**PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026**

WALIKOTA PADANG PANJANG,

- Menimbang** : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan pasal 3 dan pasal 4 Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor : PER/9/M.PAN/5/2007 tentang Pedoman Umum Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Instansi Pemerintah; dan
- b. bahwa Penetapan Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu di atur dan ditetapkan dengan Surat Keputusan Walikota Padang Panjang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah; sebagaimana telah diubah terakhir kalinya dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Peraturan Pemerintah (PP) tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah
4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
5. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 Tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah

Lembar Kedua : Keputusan Walikota Padang Panjang
Nomor : 050/1/Bappeda-PP/2024
Tanggal : 2 Januari 2024

8. Peraturan Daerah Kota Padang Panjang Nomor 06 Tahun 2023 tentang Rencana Pembangunan Daerah Tahun 2024-2026
9. Peraturan Walikota Padang Panjang Nomor 75 tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN WALIKOTA PADANG PANJANG TENTANG PENETAPAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG TAHUN 2024-2026.

- KESATU** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana tercantum dalam lampiran surat keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang, untuk menetapkan rencana kinerja tahunan dan rencana kinerja anggaran, menyusun dokumen penetapan kinerja, menyusun laporan akuntabilitas kinerja serta melakukan evaluasi pencapaian kinerja sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.
- KEDUA** : Indikator Kinerja Utama sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU, disusun dengan mengacu kepada Indikator Kinerja Strategis Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang.
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Padang Panjang
pada tanggal 2 Januari 2024

**An. WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN
DAN PENGEMBANGAN DAERAH
KOTA PADANG PANJANG**



RUSDIANTO, S.IP, MM.
NIP. 19640402 198602 1 003

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :

1. Ketua DPRD Kota Padang Panjang;
2. Inspektur Kota Padang Panjang;
3. Bagian Organisasi Sekretariat Daerah Kota Padang Panjang;
4. Arsip

Lampiran : Keputusan Kepala Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang
 Nomor : 050/1/BAPPEDA-PP/2024
 Tanggal : 2 Januari 2024
 Tentang : Tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (Iku) Badan Perencanaan, Penelitian Dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang Tahun 2024-2026

INDIKATOR KINERJA UTAMA TAHUN 2024-2026
BADAN PERENCANAAN PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	PENJELASAN				KET
				ALASAN (PERMASALAHAN YANG AKAN DISELESAIKAN)	DEFENISI OPERASIONAL	URUSAN	SUMBER DATA	
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1.	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	Indeks	- Kurangnya konsistensi perencanaan, pengendalian dan evaluasi pembangunan Daerah - Kurangnya koordinasi sinkronisasi perencanaan pembangunan daerah	Sub Dimensi Penilaian - Forum SKPD (5%) - Konsultasi Publik (10%) - Musrenbang Kota (15%) - Data Pendukung (15%) - Konsistensi (20%) - Inovasi (5%) - Capaian Kinerja (15%) - Pengendalian Rencana Kerja (10%) - Penganggaran (5%)	Perencanaan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	
2.	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Indeks	Belum optimalnya penerapan hasil keltibangan dalam pengambilan kebijakan	Hasil penilaian IGA oleh Kemendagri	Penelitian dan Pengembangan	Badan Perencanaan Penelitian dan Pengembangan Daerah	

Ditetapkan di Padang Panjang
 pada tanggal 2 Januari 2024

An: WALIKOTA PADANG PANJANG
KEPALA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN
PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG


RUSDIANTO, S.IP. MM.
NIP. 19640402 198602 1 003

Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan I

PENGUKURAN KINERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TRIWULAN I TAHUN ANGGARAN 2024									
No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi					Salah
				I	II	III	IV	Realisasi	
				1	2	3	4	%	
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	70,00%	5	6	7	8	19,39%	27,70%
2	Meningkatnya Kualitas Realisasi dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Inovatif					10,00%	

Padang Panjang, 2 April 2024
Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

DAN PENGEMBANGAN DAERAH KOTA PADANG PANJANG

RUSDIANTO, S.P. MM.
NIP. 19640402 198602 1 003



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa / 2 April 2024
Agenda Rapat : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan I atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA Tahun ini
Peserta Rapat : ASN di lingkungan BAPPEDA Kota Padang Panjang

- Evaluasi kinerja kali ini untuk Triwulan I Tahun 2024 disampaikan pada rapat staff bersama Kepala BAPPEDA dan menyampaikan informasi terkait evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- Realisasi sub kegiatan pada Bappeda Kota Padang Panjang Triwulan I Tahun Anggaran 2024 realisasi fisik mencapai 27,70% dengan realisasi keuangan Rp.1.278.131.468,- (19,85%) dari total anggaran Rp.6.439.796.914,-.
- Sesuai Rencana Realisasi Fisik dan Keuangan yang telah ditetapkan di awal tahun, untuk Triwulan I ditetapkan rencana fisik sebesar 27,70% dan keuangan Rp.2.073.886.298,- (32,20%).
- Dari rencana fisik dan realisasi fisik sudah sesuai namun mengalami kekurangan pada realisasi keuangan sebesar Rp.795.754.830,- (12,36%).
- Pada Triwulan I ini terjadi 2 kali Recofusing Anggaran, yakni
 - Recofusing I dalam rangka menutup Devisit tahun 2023, mengurangi anggaran sebesar Rp.286.823.300,-. Anggarannya dicarikan dari 6 Sub Kegiatan di Lingkup Bappeda.
 - Recofusing II dalam rangka pemenuhan TPP pada THR dan Gaji 13, mengurangi anggaran sebesar Rp.150.005.800,-. Anggarannya dicarikan dari 9 Sub Kegiatan di Lingkup Bappeda.
- Recofusing yang dilaporkan belum dientrikan, namun dicadangkan untuk di hilangkan pada Triwulan IV, dan masih menjadi pembagi dalam pelaporan evaluasi kinerja yang disusun setiap bulan.
- Demikian dapat disampaikan beberapa informasi dari rapat tersebut.

Mengetahui :

Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

RUSDIANTO, S.P. MM.
NIP. 19640402 198602 1 003

Notulis,

FALAHUDDIN, S.A.P.
NIP. 19870303 200902 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa / 2 April 2024
Acara : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan I atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANGGAPAN
1	Rusdianto	Ketua	
2	Agus Satrio	Ketua	
3	Erny Nafis	Bid. Es. Da	
4	Jamari	Kab. & Laki	
5	Heri Satrio	Kab. & Laki	
6	Antoni Aji	Bid. Es. Da	
7	Laili Kusni	Bid. Es. Da	
8	Arali Hazi	Bid. Es. Da	
9	Heri Satrio	Bid. Es. Da	
10	Heri Satrio	Bid. Es. Da	
11	Fadly	Bid. Es. Da	
12	Falahuddin	Bid. Es. Da	
13	Kata Sunjani	Bid. Es. Da	
14	Indra Varni	Bid. Es. Da	
15	Rika Feryanti	Bid. Es. Da	

Padang Panjang, 2 April 2024
Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

RUSDIANTO, S.P. MM.
NIP. 19640402 198602 1 003

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN I ATAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN SERTA CAPAIAN RENCANA AKSI INTERNAL BAPPEDA TAHUN 2023 SELASA, 2 APRIL 2024



Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan II

PENGUKURAN KINERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TRIWULAN II TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	IV	III	II	I	Realisasi	% Capaian	Perencanaan	Solusi
1	Meningkatnya Kualitas Pemerintahan	Indeks Kualitas Pemerintahan	70,00%	79,39%	7	6	7	6	34,12%	40,17%	11	12
2	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Berikut Inovasi							40,00%		

Padang Panjang, 2 Juli 2024
Pdt. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

ARGUS SAADAH, S.Sos M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Selasa / 2 Juli 2024
Agenda Rapat : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan II atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA Tahun ini
Peserta Rapat : ASN di lingkungan BAPPEDA Kota Padang Panjang

- Evaluasi kinerja kali ini untuk Triwulan II Tahun 2024 disampaikan pada rapat staff bersama Kepala BAPPEDA dan menyampaikan informasi terkait evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- Realisasi sub kegiatan pada Bappeda Kota Padang Panjang Triwulan II Tahun Anggaran 2024 realisasi fisik mencapai 48,74% dengan realisasi keuangan Rp.3.115.413.036,- (48,38%) dari total anggaran Rp.6.439.796.914,-.
- Sesuai Rencana Realisasi Fisik dan Keuangan yang telah ditetapkan di awal tahun, untuk Triwulan II ditetapkan rencana fisik sebesar 54,67% dan keuangan Rp.3.959.904.248,- (61,49%).
- Dari rencana fisik dan realisasi fisik mengalami keterlambatan sebesar 5,93% dan kekurangan pada realisasi keuangan sebesar Rp.844.491.212,- (13,11%).
- Hal ini terjadi karena sebagian anggaran recufusing kedua yang dilaporkan belum dientrikan, namun dicadangkan untuk di hilangkan pada Triwulan IV, dan masih menjadi pembagi dalam pelaporan evaluasi kinerja yang disusun setiap bulan.
- Demikian dapat disampaikan beberapa informasi dari rapat tersebut.

Mengetahui :

Pdt. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

ARGUS SAADAH, S.Sos M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001

Notulis,

FALAHUDDIN, S.A.P
NIP. 19870303 200902 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Selasa / 2 Juli 2024
Acara : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan II atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Argus Saadah	Pdt. Bappeda	1
2	Emy Hala	Bid. asal Bappeda	2
3	Anni Anji	Kab. PMIBP	3
4	Nisa Alhanna	Kab. PMIBP	4
5	Farhan	Kab. PMIBP	5
6	Elma Durranti	Perencana	6
7	Hafidza	Perencana	7
8	Feri Retnadin	Perencana	8
9	Jadid	Perencana	9
10	Laili Yumie	Perencana	10
11	Falahuddin	Perencana	11
12	Diboro	Perencana	12
13	Rahma Fitriyanti	Perencana	13
14	Rina L	Perencana	14
15	Ade Sugun	Perencana	15

Padang Panjang, 2 Juli 2024
Pdt. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

ARGUS SAADAH, S.Sos M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II ATAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA BAPPEDA TAHUN 2024 SELASA, 2 Juli 2024



Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan III

PENGUKURAN KINERJA BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH TRIWULAN III TAHUN ANGGARAN 2024

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target	Realisasi												Pencapaian	% Capaian	Sesuai	Solusi
				I	II	III	IV	V	VI	VII	VIII	IX	X	XI	XII				
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	75,00%	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19
2	Meningkatnya Kualitas Road dan Town & Country	Indeks Kualitas Road dan Town & Country	Sangat Baik																

Padang Panjang, 30 September 2024
Pdt. Kepala Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kota Padang Panjang
ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Senin / 30 September 2024
Agenda Rapat : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan III atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA Tahun ini
Peserta Rapat : ASN di lingkungan BAPPEDA Kota Padang Panjang

- Evaluasi kinerja kali ini untuk Triwulan III Tahun 2024 disampaikan pada saat apel Senin pagi Bersama yang langsung dipimpin oleh Kepala BAPPEDA, dan menyampaikan informasi terkait realisasi fisik dan keuangan yang terkait evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- Realisasi sub kegiatan pada Bappeda Kota Padang Panjang Triwulan III Tahun Anggaran 2024 realisasi fisik mencapai 69,00% dengan realisasi keuangan Rp.4.317.672.328,- (67,05%) dari total anggaran Rp.6.439.796.914,-.
- Sesuai Rencana Realisasi Fisik dan Keuangan yang telah ditetapkan di awal tahun, untuk Triwulan III keadaan September telah ditetapkan rencana fisik sebesar 72,26% dan keuangan Rp.5.336.651.707,- (82,87%).
- Dari rencana fisik dan realisasi fisik mengalami keterlambatan sebesar 3,26% dan kekurangan pada realisasi keuangan sebesar Rp.1.018.979.379,- (15,82%).
- Hal ini terjadi karena sebagian anggaran reconfusing kedua yang dilaporkan belum dientrikan, namun sudah di hilangkan pada anggaran perubahan namun untuk bulan ini masih menjadi pembagi dalam pelaporan evaluasi kinerja yang disusun setiap bulan.
- Demikian dapat disampaikan beberapa informasi dari rapat tersebut.

Mengetahui :

Pdt. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

Argus Saadah
ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001

Notulis,

Falakhuddin, S.A.P
FALAKHADDIN, S.A.P
NIP. 19870303 200902 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

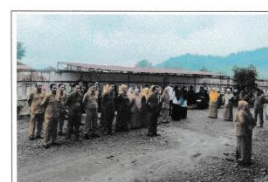
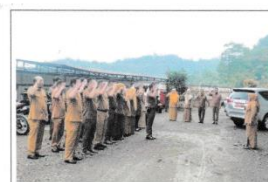
Hari/Tanggal : Senin / 30 September 2024
Acara : Evaluasi Pengukuran Kinerja Triwulan III atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA Tahun 2024

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1	Argus Saadah	Pdt. ka Bappeda	<i>Argus Saadah</i>
2	Enny Hani	Bid. ES&PA	<i>Enny Hani</i>
3	Jamardi	Bid. L&K	<i>Jamardi</i>
4	Aur Asyahan	Kand. Makro	<i>Aur Asyahan</i>
5	Fadili	Perencana	<i>Fadili</i>
6	Airil Hudi	Perencana	<i>Airil Hudi</i>
7	Hina L	Pengada. Keum	<i>Hina L</i>
8	Roz Maruti	Ang. outa. Inten	<i>Roz Maruti</i>
9	Falakhuddin	Perencana	<i>Falakhuddin</i>
10	Emma Bernart	Perencana	<i>Emma Bernart</i>
11	Hadijah	Perencana	<i>Hadijah</i>
12	Fenri Wahid	Perencana	<i>Fenri Wahid</i>
13	Nisrah Agum	Perencana	<i>Nisrah Agum</i>
14	Indra Virumet	Perencana	<i>Indra Virumet</i>
15	Rita Fitriyani	Ang. Keuangan	<i>Rita Fitriyani</i>

Padang Panjang, 30 September 2024
Pdt. Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

Argus Saadah
ARGUS SAADAH, S.Sos, M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PENGUKURAN KINERJA TRIWULAN II ATAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA BAPPEDA TAHUN 2024 SENIN, 30 SEPTEMBER 2024



Laporan Pengukuran Kinerja Triwulan IV

**PENGUKURAN KINERJA
BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH
TRIWULAN IV TAHUN ANGGARAN 2024**

No	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Realisasi				% Capaian	Pencapaian	Skor
			I	II	III	IV			
1	Meningkatnya Kualitas Perencanaan	Indeks Kualitas Perencanaan	70,00%	72,00%	72,00%	72,00%	100,00%	Sangat Baik	12
2	Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah	Indeks Inovasi Daerah	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	Sangat Baik	100,00%	Sangat Baik	12



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Islamic Centre No.1 Padang Panjang Kode Pos 27122
Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

NOTULEN RAPAT

Hari / Tanggal : Jumat / 3 Januari 2025
Agenda Rapat : Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024, dan Rencana Kinerja Tahun 2025
Peserta Rapat : ASN di lingkungan BAPPEDA Kota Padang Panjang

- Evaluasi kinerja kali ini untuk Triwulan IV Tahun 2024 disampaikan pada saat rapat staf di awal tahun 2025 yang langsung dipimpin oleh Kepala BAPPEDA, dan menyampaikan informasi terkait realisasi fisik dan keuangan yang terkait evaluasi kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan.
- Realisasi sub kegiatan pada Bappeda Kota Padang Panjang III Tahun Anggaran 2024 realisasi fisik mencapai 100,00% dengan realisasi keuangan Rp.6.056.879.013,- (98,33%) dari total anggaran Rp.6.160.020.196,-. Dengan sisa anggaran sebesar Rp.103.141.183.
- Ada 2 Sub Kegiatan yang tidak mencapai realisasi keuangan 70% yakni : (a) Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik (69,85%). Sub kegiatan penyediaan jasa komunikasi, sumber daya air dan listrik berupa pembayaran tagihan air ke PDAM dan tagihan listrik ke PLN, dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan tagihan pemakaian air dan listrik per bulannya. Namun kantor kami pindah pada bulan Juni ke Gedung BKPSDM lantai (1) satu jadi tidak ada pembayaran tagihan air dan tagihan listrik. (b) Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya (62,78%). Sub kegiatan pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya berupa belanja pemeliharaan peralatan kantor dan mesin seperti pemeliharaan AC, soundsystem, kamera, computer, laptop dan printer, dimana pembayaran dilakukan sesuai dengan tagihan jika ada pemeliharaan dimaksud.
- Untuk Pengukuran Kinerja atas Sasaran Strategis BAPPEDA Tahun 2024 yakni :
 - Meningkatnya Kualitas Perencanaan, IK : Indeks Kualitas Perencanaan, Target : 70,00, Realisasi : 72,20 (103,14%).
 - Meningkatnya Kualitas Riset dan Inovasi Daerah, IK : Indeks Inovasi Daerah, Target : Sangat Inovatif, Realisasi : Sangat Inovatif (100%).
- Demikian dapat disampaikan beberapa informasi dari rapat tersebut.

Mengetahui :
Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

ARGUS SAADIAH, S.Sos M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001

Notulis,

FALAHUDDIN, S.A.P
NIP. 19870303 200902 1 001



PEMERINTAH KOTA PADANG PANJANG BADAN PERENCANAAN, PENELITIAN DAN PENGEMBANGAN DAERAH

Jalan Perintis Kemerdekaan No.4 Padang Panjang Kode Pos 27114 Telp. (0752) 83147 - 83148 Fax 484623
Email : bappeda@padangpanjang.go.id - Website : www.bappeda.padangpanjang.go.id

DAFTAR HADIR RAPAT

Hari/Tanggal : Jumat / 3 Januari 2025
Acara : Evaluasi Pengukuran Kinerja Tahun 2024, dan Rencana Kinerja Tahun 2025
atas program, kegiatan dan sub kegiatan pada BAPPEDA

NO	NAMA	JABATAN	TANDATANGAN
1			1
2	Emmy Hafni	Brk. Esaki Bappeda	2
3	Nura Asahan	Brk. M. Adro	3
4	Ambari Ariq	Brk. Prinsip	4
5	Hafizah	F. Perencana	5
6	Emma Nurman	F. Perencana	6
7	Luf. Euzra		7
8	Hafiza Nandari	Anal. Kegiatan	8
9	Fadiah	F. Perencana	9
10	Mila Vunur	Anal. Keuangan	10
11	Ara H. H.	F. Perencana	11
12	Ar. H. H.	Pln.	12
13	Riska Febrina	Anal. Keuangan	13
14	Debari & Vanyata	Kebijakan	14
15	Falahuddin	Perencana	15

Padang Panjang, 3 Januari 2025
Kepala BAPPEDA Kota Padang Panjang

ARGUS SAADIAH, S.Sos M.Si
NIP. 19721016 199303 2 001

DOKUMENTASI RAPAT EVALUASI PENGUKURAN KINERJA 2024 DAN RENCANA KINERJA TAHUN 2025 ATAS PROGRAM, KEGIATAN DAN SUB KEGIATAN PADA BAPPEDA TAHUN 2024 JUMAT, 3 JANUARI 2025



